

30/84

6

Hasil Penelitian

PERKEMBANGAN TABUNGAN
MASYARAKAT DI
SUMATERA BARAT

O
l
e
h

Lukman Yacub

Fakultas Ekonomi Universitas

Andalas Padang

1984



KAAN
LA

BAB I

: MASALAH TABUNGAN DI SUMATERA BARAT

A LATAR BELAKANG DAN MASALAH.

: Dalam Pelita IV yang telah resmi dilaksanakan sejak 6 bulan yang lalu dinyatakan dengan jelas, bahwa didalam usaha peningkatan pemupukan tabungan masyarakat, kebijaksanaan yang ditempuh adalah mendereng kebiasaan menabung dikalangan masyarakat dalam bentuk Deposite berjangka pada Bank-Bank Pemerintah, Tabanas, Taska, sertifikat deposite serta pembelian surat obligasi dan saham. Usaha peningkatan pemupukan tabungan masyarakat tersebut yang merupakan salah satu mata rantai kegiatan ekonomi yang ditempuh pemerintah tidak dapat dilepaskan dari apa yang telah ditetapkan dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN), yang menjadi tujuan Pembangunan Pelita IV yaitu :

Pertama : meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan seluruh rakyat yang semakin merata dan adil.

Kedua : meletakkan landasan yang kuat untuk taraf pembangunan berikutnya.

Menurut pandangan banyak ahli-ahli ekonomi modal mempunyai kedudukan yang terpenting dalam teori pembangunan ekonomi. ^{1/}

Pandangan ahli-ahli ekonomi diatas terpaut kepada pendapat Keynes yang menyatakan, bahwa pendapatan dan kesempatan kerja tergantung kepada investasi.

^{1/}. CP. Kindleberger. Pembangunan Ekonomi, Dian Rakyat, Jakarta halaman, 41.

Para ahli ekenomi klasik menekankan penumpukan modal dengan jalan menabung. 2/

Severa teori pada setiap negara yang sedang membangun dengan lebih banyak menumpuk modal riil, bila bersedia mengurangi konsumsi. Akan tetapi kalau hal ini dilaksanakan pada negara yang taraf konsumsinya rendah, pengurangan tersebut akan mengakibatkan timbulnya angka kematian.

Dari ekenomi makro tabungan dan investasi memberikan gambaran ada tidaknya resource gap, karena tersedianya dana untuk investasi adalah bersumber dari tabungan.

Akan halnya tabungan ini kita menghadapi kenyataan rendahnya hasrat menabung oleh masyarakat, sehingga tabungan menjadi tidak cukup untuk membiayai investasi yang diperlukan untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekenomi yang dikehendaki.

Oleh sebab itu kebutuhan pembiayaan dalam pembangunan berhubungan erat dengan laju pertumbuhan ekenomi yang diinginkan, besarnya ratio capital terhadap output, tabungan masyarakat dan tingkat teknologi yang dipakai. 3/

Dari 2 golongan tabungan, yaitu tabungan pemerintah dan tabungan masyarakat pada mana tabungan yang terakhir ini sukar dapat ditentukan jumlah dengan pasti. Keadaan ini bertalian dengan kurangnya hasrat menabung pada masyarakat negara berkembang yang bukan saja disebabkan oleh rendahnya tingkat pendapatannya, akan tetapi adat istiadat yang berlaku, pola konsumsi yang tinggi dan kurang tersedianya lembaga-lembaga keuangan sebagai sarana untuk menabung merupakan hal-hal yang tak kurang pentingnya.

Antara kesediaan menabung dengan kemampuan menabung merupakan dilemma yang bersifat lingkaran yang tak berujung pangkal. Kemampuan menabung yang kecil berpangkal dari pendapatan riil yang rendah.

2/. Nerman. S Buchman dan Howard S, Ellis. Memajukan Ekenomi Daerah Terkebelakang, Djaya Sakti, Jakarta, 1961.

3/. Faried Wijaya. Pembentukan Modal dan Sumber Pembiayaan, Prisma, Januari, 1979.

B A B. IV

KEMUNGKINAN PENINGKATAN TABUNGAN

Didalam sistem demokrasi ekonomi yang diatur didalam pasal 33 UUD 1945 ditentukan bahwa masyarakat harus memegang peranan aktif dalam pembangunan. Namun jika diperhatikan perkembangan tabungan dan peranannya, baik tabungan rumah tangga maupun tabungan perusahaan yang merupakan sumber investasi dalam daerah Sumatera Barat relatif masih sangat kecil. Dari seluruh investasi non pemerintah pada Pelita Ketiga hanya 22,6 % saja yang berasal tabungan rumah tangga dan tabungan perusahaan. Hal ini merupakan pratanda rendahnya tabungan masyarakat yang dapat disediakan sebagai sumber biaya dalam pembangunan.

Untuk kemungkinan peningkatan tabungan masyarakat ini di Sumatera Barat, penulis secara berturut-turut penulis akan mencoba melihat dari dua sektor.

A. Pemerintah

B. Masyarakat.

A. Pemerintah.

Upaya pemerintah dalam meningkatkan tabungan masyarakat merupakan bagian dari usaha pemerintah dalam menggali sumber dana yang pada gilirannya digunakan sebagai sumber biaya dalam pembangunan. Dalam banyak hal ia tidak dapat dipisahkan dengan kebijaksanaan moneter dan keuangan negara. Namun dalam hal ini kita akan mencoba melihatnya dalam hubungannya.

1. Jumlah lembaga-lembaga keuangan
2. Kualitas lembaga-lembaga keuangan dan
3. Stabilitas uang dan harga.

B A B . V

K E S I M P U L A N

Peranan tabungan masyarakat perlu ditingkatkan dalam menunjang tercapainya laju pertumbuhan ekonomi daerah Sumatera Barat, walau - pun telah terdapat peningkatan investasi yang berasal dari tabungan rumah tangga dan tabungan perusahaan. Namun masih terdapat dalam jumlah karena terdiri dari nilai yang relatif kecil.

Untuk meningkatkan hasrat menabung di daerah Sumatera Barat perlu diambil langkah - langkah kebijaksanaan yang dapat menimbul - kan minat yang lebih besar bagi calon menabung. Untuk ini diperlu - kan pula peningkatan prasarana dan saran penunjang, seperti perang - kat administrasi yang sederhana, prosedur yang tidak berbelit, pimpinan yang cakap serta service yang baik.

Dikalangan masyarakat sendiri harus pula ditimbulkan kemampuan dan kesadaran menabung dengan menanamkan rasa kewajiban menabung yang dimuali dari tingkat anak - anak. Bila telah tertanam rasa kewajiban menabung bagi anak - anak, kebiasaan tersebut akan ter - bawa sampai dewasa.

Mendorong menabung berarti menekan pola konsumsi tinggi yang pada gilirannya konsumen tidak akan melakukan konsumsi yang lebih besar dari pendapatan.

Sekurang - kurangnya tidak akan tergoda dengan rayuan kredit kon - sumen yang dapat menjerat konsumen dengan pembelian biaya tinggi.

Didalam usaha peningkatan pemupukan tabungan masyarakat tersebut, kebijaksanaan yang ditempuh adalah mendorong kebiasaan menabung dikalangan masyarakat dalam bentuk deposito berjangka pada Bank-bank Pemerintah, Ta-

banas / Taska, sertifikat deposito, serta pembelian surat obligasi dan saham. Dengan paket 1 Juni 1983, pemerintah telah mengeluarkan kebijaksanaan baru, antara lain memberikan tanggung jawab yang lebih besar kepada Bank-bank Pemerintah untuk menetapkan suku bunga deposito berjangka tersebut. Disamping itu berlakunya ketentuan tentang penghapusan pajak atas bunga, deviden dan royalty bagi deposito valuta asing di bank-bank.

Gairah menabung dikalangan masyarakat akan terwujud bila terciptanya pemantapan tingkat harga dan kestabilan ekonomi pada umumnya. Alat pengukur perkembangan tingkat harga (laju inflasi) selama Repelita III adalah Indek Harga Konsumen (IHK) yang merupakan gabungan dari indik harga konsumen tujuh belas dan mencakup barang-barang dan jasa-jasa sekitar 115 - 150 jenis. Laju inflasi selama Repelita III cukup terkehdali, yaitu padatahun 1983/1984, yaitu sebesar 7,33 persen.

Perkembangan yang cukup menggembirakan di daerah Sumatera Barat adalah tabungan dalam bentuk Tabans / Taska, yakni dalam kurun waktu 4 tahun yang teraludit (sampai dengan bulan Desember 1984), jumlah penabung di Sumatera Barat meningkat menjadi lebih dari dua kali lipat atau tepatnya 229,6 perse. Disamping itu jumlah tabungan rata-rata per penabung meningkat sebesar 124,02 persen.

Bila dibandingkan dengan tingkat nasional jumlah penabung meningkat sebesar 138,79 persen, sedangkan jumlah tabungan per penabung meningkat sebesar 149 persen dalam waktu yang sama. Hal ini membuktikan bahwa kecuali jumlah tabungan rata-rata, maka penambahan jumlah penabung dan nominalnya untuk Sumatera Barat adalah lebih besar dari penambahan jumlah penabung dan nominalnya secara nasional.

DAFTAR BACAAN

1. Ace Partardiraja. Perhitungan Pendapatan Nasional, LP3ES, Jakarta 1977.
2. BAPPENAS. Rencana Pembangunan Lima Tahun Keempat 1984/1985 - 1988/1989, Jakarta, 1984.
3. BAPPEDA. Rencana Pembangunan Lima Tahun Ketiga, 1979/1980 - 1983/1984, Propinsi Sumatera Barat, Padang, 1979.
4. BAPPEDA. Sumatera Barat Dalam Angka, Padang, 1979.
5. C.P. Kindleberger. Pembangunan Ekenomi, PT. Dian, Jakarta, 1965.
6. Gardner Ackly. Teori Ekenomi Makro, UZ, Jakarta, 1973.
7. G.H. Meier & RE. Baldwin. Pembangunan Ekenomi, Bhratara, Jakarta, 1965.
8. Dr. Irawan, MBA, Dra. Suparmake, MA. Ekenomi Pembangunan, BP FE Gajah Mada, Yogyakarta, 1974.
9. Mubyarto dan Budiene. Ekenomi Pancasila, BP FE Gama, Yogyakarta, 1980.
10. Nathan Keyfita dan Widjeye Nitisaastre. Seal Penduduk dan Pem - bangunan Ekenomi, PT. Pembangunan, Jakarta, 1964.
11. Nerman. S, Buchanan Cs. Memajukan Ekenomi Daerah Terbelakang, Jaya Sakti, Jakarta, 1961.
12. Rustian Kamaluddin, Ekenomi Pembangunan, Universitas Andalas, Padang, 1976.
13. Ragnar Nurkse. Pembentukan Medal di Negara - Negara Yang Sedang Membangun, Bhratara, Jakarta, 1964.
14. Sadene Sukirne, Pengantar Teori Makro Ekenomi, Binagrafika, Kualalumpur, 1984.
15. Sadene Sukirne, Ekenomi Pembangunan, Berta Gerat, Medan, 1978.